KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 5 1 9			H.4 X Final		
		H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			H.5 Tidak Final		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG							
A.1 NPWP : 68 807 585 2 722 000							
A.2 NIK :							
A.3 Nama : TAMAT							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER-	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	NPWP)	B.6	B.7	
1	21-402-01	6.009.200		0	5	300.460	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 90							
Nama Dokumen Faktur Pajak Tanggal 2 5 dd 0 2 mm 2 0 2 2 yyyy							
B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.							
Nomor: Tanggal dd mm yyyy							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK							
	nnsi Pemerintah :		0 1 6 2 7 2 2 FRAH ATMA HUSADA MAHAK	0 0 0 AM PROVINSI KA	IIMANTAN	I TIMLIR	
C.4 Tanggal	_	2 6 dd 0 1 mm				_	
C.5 Nama Penandatangan :		2 6 dd 0 1 mm 2 0 2 2 yyyy HARI JUMADI					
rana i ona	TIAN SOMADI					honar dan tolah saya	
C.6 Ferriyataan	Wajib Pajak :	tandatangani secara elektronik		ian Onlinasi lelah sa	ya isi derigari	beriai dan telah saya	
		Sesuai dengan ketentuan yan elektronik sehingga tidak diper	g berlaku, Direktorat Jenderal Pajal lukan tanda tangan.	s mengatur bahwa do	kumen ini tel	ah ditandatangani secara	

5TS3Y8TM